



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI**

Tahun Sidang	: 2014-2015
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke	: 4
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Dengan	: DPRD Provinsi Banten
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 20 Mei 2015
Waktu	: Pukul WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Pimpinan Komisi II DPR RI
Acara	: Konsultasi terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005.
Ketua Rapat	: H. Mustafa Kamal, S.S./Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Minarni, SH/KabagSet Komisi II DPR RI
Hadir	: 2 Anggota Komisi II DPR RI dengan rincian: 1. H. Mustafa Kamal, S.S (Wakil Ketua/F-PKS) 2. Ammy Amalia Fatma

I. PENDAHULUAN

- A. Rapat RDPU Komisi II DPR RI dengan DPRD Provinsi Banten pada hari Rabu, 20 Mei 2015 dibuka pukul 13.15 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, **DR. Wahidin Halim, M.Si** dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- B. Ketua Rapat menyampaikan Agenda Rapat RDPU Komisi II DPR RI dengan DPRD Provinsi Banten terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 53 Tahun 2014.
- C. Ketua Rapat mempersilahkan kepada DPRD Provinsi Banten untuk memberikan penjelasan terkait kedatangannya ke Komisi II DPR RI.
- D. DPRD Provinsi Banten menjelaskan beberapa hal diantaranya:
 1. Terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 53 tahun 2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015, dimana dengan adanya PMK Nomor 53 Tahun 2014 memberikan dampak bagi Anggota DPRD yang dirasakan adalah semakin kecilnya jumlah anggaran untuk biaya perjalanan dinas, dimana beberapa daerah merasakan bahwa standar biaya yang ditetapkan berdasarkan PMK tersebut tidak sesuai dengan jumlah riil yang harus dikeluarkan.

2. Terkait dengan kepastian pelantikan Gubernur Provinsi Banten dimana walaupun sudah ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan, namun hingga saat ini Kemendagri belum menerima salinan putusan dari Pengadilan sehingga proses pelantikan Plt. Gubernur Provinsi Banten menjadi Gubernur definitif belum dapat dilaksanakan.
3. Terkait dengan pemekaran di wilayah Provinsi Banten yang sudah diajukan pada periode sebelumnya, DPRD Provinsi Banten meminta kejelasan kepada Komisi II DPR RI terkait dengan tindak lanjut terhadap usulan pemekaran di wilayah Provinsi Banten.

II. KESIMPULAN

Komisi II DPR RI menerima aspirasi DPRD Provinsi Banten dan akan mengkomunikasikan permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh DPRD Provinsi Banten tersebut dalam Raker dengan Mendagri terkait dengan:

1. PMK Nomor 53 Tahun 2014;
2. Kepastian akan pelantikan Gubernur Provinsi Banten; dan
3. Tindaklanjut usulan Pembentukan DOB di Wilayah Provinsi Banten.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.45 WIB.

Jakarta, 20 Mei 2015
Wakil Ketua Komisi II DPR RI

Ttd

DR. Wahidin Halim, M.Si
A-440